

BAB III

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KABUPATEN BELITUNG**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisa dan interpretasi data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di Kabupaten Belitung. Dalam penelitian ini data yang penulis analisa berasal dari data primer dimana data tersebut berasal dari masyarakat dengan melalui wawancara dan juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada.

Kemudian dengan data-data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari hasil penelitian, selanjutnya akan diklarifikasikan sesuai dengan implementasinya.

A. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 2006 - 2010

A.1. Implementasi Sub Program KUBE FM berdasarkan faktor Komunikasi.

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) merupakan wadah usaha para penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang beranggotakan 5 orang atau lebih yang memiliki satu keterampilan kerja. KUBE Fakir Miskin tersebut memiliki prinsip kebersamaan dalam mengelola usaha secara berkelompok, dimana anggotanya berdomisili dalam satu wilayah yang memungkinkan mereka saling berinteraksi.

Tidak ditemukan masalah mengenai kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana khususnya pihak-pihak yang terkait terhadap

pelaksanaan program ini. Dinas Sosial Kabupaten Belitung menerima surat dari Dinas Kesejahteraan Provinsi Bangka Belitung, dan Dinas Sosial Kabupaten menanggapi surat tersebut. Staf Dinas Sosial Kabupaten mulai mendatangi desa-desa yang akan diberi bantuan, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat, khususnya ke kecamatan penerima, yang di tembuskan ke Camat. Setelah itu staf Dinas Sosial Kabupaten memberi penjelasan kepada Kepala Desa dengan tujuan melapor dan mohon pendampingan dari staf desa untuk ke lapangan. Setelah disetujui oleh Kepala Desa maka staf Dinas Sosial beserta staf desa mencari ke desa tersebut guna untuk pendataan.

Koordinasi antar pihak desa, kecamatan, dan Dinas Sosial Kabupaten berjalan baik, dimana Dinas Sosial Kabupaten bekerja sama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat Desa) dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dalam mendata nama-nama untuk diusulkan menjadi penerima bantuan KUBE FM. Koordinasi dilakukan lewat briefing dan tatap muka langsung. Pendataan dilakukan pada bulan Februari.

Setelah terkumpul data dari pihak desa dan kecamatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung me-rekapitulasi data tersebut dan mengirimkannya ke Dinas Kesejahteraan Provinsi Bangka Belitung. Setelah itu Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi turun kelapangan untuk menverifikasi data sekaligus melakukan tinjauan ulang, pada bulan April. Setelah itu tinggal menunggu cairnya dana.⁴²

⁴² Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

Apabila terdapat masalah, misalnya peng-koreksian nama-nama penerima bantuan dan lain-lain, mereka sesekali saling berkoordinasi melalui telepon ataupun datang langsung untuk memberikan ataupun mendapatkan kejelasan. Tidak ditemukan konflik dalam komunikasi antar pihak-pihak pelaksana, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur.

A.2. Implementasi Sub Program KUBE FM berdasarkan faktor sumber daya.

Sumberdaya atau dana yang disediakan untuk KUBE FM berasal dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Babel, yang nantinya dana tersebut akan di konversi menjadi barang-barang peralatan produksi dan bahan pokok yang akan menjadi modal untuk Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin. Waktu yang diperlukan tersedia atau bisa dikatakan tidak adanya tenggat waktu, oleh karena itu dalam pemberian bantuan ini diperlukan waktu yang relatif lama yaitu sekitar 5-6 bulan sejak pendataan sampai bantuan sampai ke kelompok KUBE. Februari / Maret pendataan dan realisasi sekitar Juli sampai Agustus.⁴³

Adapun fasilitas atau bantuan-bantuan yang diberikan dalam program KUBE khususnya untuk wilayah kecamatan Membalong Kabupaten Belitung diantaranya adalah :

⁴³ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

Tabel. 5.

Daftar Nama Penerima Bantuan Kube Fakir Miskin

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Usaha yang Diajukan	Nama Barang
1	Ropia	57	Ketua	Jahit menjahit	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin jahit 8 bh - Mesin obras 2 bh - Benang obras 4 gulung - Benang jahit 8 set
	Jasima	59	Wakil Ketua		
	Rebuya D	53	Sekretaris		
	Rebuya R	54	Bendahara		
	Mariam	60	Anggota		
	Idayani	37	Anggota		
	Setiah	55	Anggota		
	Hartati	33	Anggota		
	Seripa	48	Anggota		
	Supiah	42	Anggota		
2	Baudin	41	Ketua	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Bubu kepiting 500 bh - Tali aris ukr. 5 mm 60 gulung
	Suit	55	Wakil Ketua		
	Saharan	55	Sekretaris		
	Munizar	42	Bendahara		
	Adil	60	Anggota		
	Aliman	63	Anggota		
	Duahap	75	Anggota		
	Kasim	70	Anggota		
	Muhammad	44	Anggota		
	Rahim	41	Anggota		
3	Suhli	42	Ketua	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Bubu kepiting 500 bh - Tali aris ukr. 5 mm 50 gulung
	Juhaidi	68	Wakil Ketua		
	Baharudin	70	Sekretaris		
	Mat Ahid	64	Bendahara		
	Sael	59	Anggota		
	Jupri	48	Anggota		
	Asia	65	Anggota		
	Baima	62	Anggota		
	Semaun	62	Anggota		
	Aminah	70	Anggota		

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Usaha yang Diajukan	Nama Barang
4	Masno Ismanto Mairum Israni Maroino Arzili Razak Marhani Kasirun Samin	37 40 29 35 39 32 50 44 27 35	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Pertanian	- Bibit kacang tanah 50 kg - Kapur tanah 50 kg - Pupuk KCL 200 kg - Super phos 500 kg - Wareng hitam 3in1 100 kg - Rundup 20 liter - Gramax on 20 liter - Tali ukr. 4 mm 30 kg - Organik 500 kg - Cangkul 10 bh - Sarak 10 bh - Splayer (tangcai semprot) 5 bh
5	Gustia Asnani Zahra Elis Nunsia Marduya Yurhana Rosmina Mulyati Zurma	44 52 42 36 49 59 59 50 38 46	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Membuat Kue	- Kualii 10 bh - Nampan 10 bh - Dandang 10 bh - Gandum 10 krg - Gula pasir 50 kg - Tepung beras 10 dus - Sendok gagang besi 10 bh - Baskom 10 bh - Tutup kualii 10 bh - Kacang hijau 50 kg - Kacang tanah 50 kg - DCL (utk pengembang kue) 50 bks - Minyak goreng 170 liter - Oven 3 bh
6	Rosmin Zawawi Madahan Hasturi Sukir Jalal Ano Apandi Candra Harjono Jemidin	54 30 55 30 49 45 24 34 35 42	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Nelayan	- Pukat udang pulut merek HSL - Tali
7	Zahmi Kasman Sazli Erfandi	39 47 31	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Peternak Ayam Petelur	- Bibit ayam petelur 60 ekor - Pakan ayam 600 kg

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Usaha yang Diajukan	Nama Barang
	Maisa	60	Bendahara		- Obat-obatan 20 bks
	Yahya	60	Anggota		- Tempat minuman ayam
	Mahidi	50	Anggota		20 bh
	Asnawi	53	Anggota		- Genset 1 bh
	Andu	37	Anggota		
	Dariman	55	Anggota		
	Sahwi	58	Anggota		

Bantuan diberikan pada awalnya saja tetapi setelah itu para petugas langsung lepas tangan tanpa ada konsolidasi lagi terhadap para penerima KUBE. Kadang bantuan yang diberikan pun ada yang sia-sia karena adanya masalah intern di dalam kelompok tersebut yaitu bantuan untuk inventaris kelompok lama kelamaan kebanyakan dialih fungsikan menjadi milik pribadi perseorangan. Bantuan yang diberikan kepada para fakir miskin pun kebanyakan tidak sesuai dengan yang dimintakan dan tidak mempunyai ketindaklanjutan. Dinas Sosial Kabupaten memang tidak memberikan persis sama seperti yang di tuliskan di proposal dan hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga.⁴⁴

Dalam hal ini pemerintah tidak bergerak efektif dan hanya bersifat pasif, dimana pemerintah hanya menerima proposal-proposal dari para fakir miskin kemudian baru ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan. Diharapkan pemerintah harus lebih jeli melihat fenomena perubahan sosial ekonomi agar prospek utama kebutuhan masyarakat terpenuhi dan lebih baik lagi dapat

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung; Ibu Sri Wulaning Yuni

menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kurang mampu tentunya. Tetapi pada umumnya bantuan yang diberikan pemerintah berjalan secara lancar.

Tabel 6.

Jumlah Sasaran dan Realisasi Jenis Bantuan

Jenis program	Jumlah sasaran	Realisasi	Jenis bantuan
KUBE FM	35 kelompok	35 kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - alat dan bahan membuat kue - alat pertanian - alat – alat nelayan - percetakan batako - servis elektronik - anyam-anyaman - membuat emping - peternakan - potong rambut - alat-alat jahit - alat-alat perbengkelan - tambak ikan - alat-alat pertukangan kayu

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Belitung memang mencapai target, dikarenakan permintaan dari Dinas Kesejahteraan Provinsi hanya sebanyak 35 kelompok karena keterbatasan dana, jadi TKSK (tenaga kerja sosial kecamatan) hanya mendata sebanyak 35 kelompok saja. Tetapi menurut observasi / temuan sebenarnya, berdasarkan pemantauan PSM (pekerja sosial masyarakat desa) sebenarnya masih banyak kelompok-kelompok usaha yang belum terdata dan oleh karena itu, walaupun memungkinkan mereka sepakat akan memasukkan orang-orang yang belum

terdata tersebut untuk menjadi kandidat penerima bantuan dalam program bantuan di tahun-tahun yang akan datang.⁴⁵

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kabupaten Belitung juga akan memberikan bantuan lagi kepada kelompok-kelompok yang berhasil meningkatkan keuntungan dalam tiap tahunnya dengan memberikan Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakat (BLPS) pada anggaran tahun berikutnya, dan diharapkan dari segi manfaat dan tujuan akan sangat membantu perekonomian masyarakat.

A.3. Implementasi Sub Program KUBE FM berdasarkan faktor disposisi / sikap pelaksana

Program ini sudah ada sejak tahun 2006 yang lalu, dan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, penulis memintakan data-data yang valid ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. Tetapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung hanya memiliki data kearsipan dari tahun 2008 saja, itupun hanya sebagian. Hal ini disebabkan karena kesemrautan pengarsipan data dokumentasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung sejak sebelum tahun 2006 maupun sesudahnya.

Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, yang dalam hal ini Ibu Sri Wulaning Yuni selaku Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga,

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.

melakukan tinjauan ulang sebagai perbaikan agar dilakukan pengarsipan yang bersifat sistematis sehingga data-data yang berkenaan dengan program-program Dinas memiliki dokumentasinya, hal ini di mulai sejak tahun 2008 yang lalu⁴⁶. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat *issue* atau masalah dalam aspek disposisi / sikap pelaksana sebagai implementor kebijakan. Adapun permasalahan lain juga ditemukan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping.

Setelah pemberian bantuan, sebagian para pendamping tadi melepas begitu saja para penerima KUBE, padahal fungsi pendamping adalah memberikan bimbingan dalam mengelola usaha, membina bagaimana agar meningkatkan penghasilan dan mengajarkan aturan pembukuan. Memang dalam hal ini para pendamping tidaklah diberikan pelatihan khusus seperti yang dilakukan terhadap pendamping pada program BLPS (bantuan langsung pemberdayaan sosial). Tetapi hal itu tidaklah menjadi alasan untuk melepaskan kewajiban karena sebelum pelaksanaan, pendamping telah diberi pengarahan dan pembekalan. Kepala seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga menerangkan bahwasanya para pendamping yang ditunjuk oleh desa boleh melakukan double job dengan kegiatan berbeda⁴⁷. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara aturan kebijakan dengan sikap / disposisi pelaksana.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

A.4. Implementasi Sub Program KUBE FM berdasarkan faktor Struktur Birokrasi

Tidak terdapat masalah dalam kejelasan struktur birokrasi. Dimana Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Babel sebagai penanggung jawab sekaligus pelaksana, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi Kabupaten Belitung. Yang dalam hal ini, diserahkan kepada Seksi Jaminan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga Dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi Kabupaten Belitung, dan dibantu oleh 5 TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dan 42 PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) tingkat desa.

B. Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) tahun 2009

B.1. Implementasi Sub Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial berdasarkan faktor komunikasi.

Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) diarahkan kepada KUBE-KUBE Fakir Miskin yang dinilai berkembang dan mandiri sebagai kelanjutan dari program bantuan KUBE dalam upaya memperkuat ketahanan dan kekuatan permodalan usaha. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang/permodalan dengan mekanisme penggunaannya untuk peningkatan dan pengembangan modal usaha kelompok.

Bantuan ini di berikan kepada KUBE FM yang dalam pembukuannya grafisnya naik atau mengalami peningkatan pendapatannya dari tiap-tiap bulan hingga per tahun. Adapun KUBE FM yang mengalami posisi stagnant atau

KUBE yang dalam usahanya tidak mengalami kenaikan maupun mengalami penurunan dalam segi pendapatan, tidak diberikan BLPS, hanya KUBE yang berhasil mengembangkan usahanya saja yang masuk kualifikasi pemberian BLPS.

Di dalam implementasi program BLPS ini, tidak ditemukan masalah dalam kejelasan memberikan perintah kepada aparat pelaksana khususnya pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan program ini. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Babel menerima surat dari Kementerian RI, cq. Direktorat Pemberdayaan Sosial yang di teruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Belitung berupa lampiran Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor: /PS.5/KPTS/VIII/2009 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pendamping di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung Penerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) Tahun 2009, dan Dinas Sosial Kabupaten menanggapi surat tersebut.

Melalui surat tersebut maka di ketahui kelompok-kelompok mana saja yang lolos seleksi sebagai kelompok penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Masing-masing Ketua KUBE FM yang akan mendapat bantuan diberikan pengarahannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Belitung untuk membuka rekening masing-masing dan tujuannya adalah agar bantuan tersebut langsung ke rekening dan tidak harus lewat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung melainkan langsung dari Kementerian RI, cq. Direktorat Pemberdayaan Sosial.

Setelah itu kelompok masing-masing diharuskan untuk menyusun atau membuat proposal sebagai syarat ketentuan penerima BLPS yang proposal tersebut isinya mendeskripsikan apa-apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Koordinasi masing-masing pihak antara penerima bantuan dengan Dinas Sosial Kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan Program BLPS, semuanya berjalan baik, tidak terkendala. Koordinasi dilakukan melalui pemanggilan ketua-ketua kelompok melalui undangan agar sekiranya bersedia datang ke Dinas Sosial untuk diberikan pengarahan.

Terdapat hambatan dalam tahapan ini, walaupun tidak terlalu berdampak negatif, yaitu para KUBE FM masing-masing diharuskan untuk menyusun atau membuat proposal tentang apa-apa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kelompok dan proposal kegiatan tersebut harus diketahui Dinas Sosial Kabupaten, desa/kelurahan, pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa.

Diantara anggota-anggota KUBE FM ini, sebagian dari mereka tidak tahu caranya bagaimana membuat proposal, bagaimana format penulisannya dan sebagian mereka juga tidak tahu bagaimana caranya mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, mereka merasa kesulitan dalam pembuatan proposal kegiatan, sehingga mereka memintakan bantuan kepada Dinas Sosial sembari berkonsultasi sekaligus meminta agar para pendamping kelompok agar membantu mereka membuat proposal atau dibuatkan proposal-proposal.

Setelah itu, masing masing kelompok mulai menyerahkan proposal tersebut yang telah di tandatangani sebelumnya oleh ketua kelompok,

bendahara kelompok, dan pendamping ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung untuk diverifikasi kebenaran proposal tersebut. setelah verifikasi, maka kelompok-kelompok tersebut dibuatkan / diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung ke Bank yang telah ditunjuk.⁴⁸

B.2. Implementasi Sub Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial berdasarkan faktor sumber daya.

Adapun kelompok - kelompok usaha bersama yang menerima BLPS adalah sebagai berikut:

Tabel. 7

Daftar Kelompok Penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Nama KUBE
1	Tanjungpandan	Pembuatan kue	1. Murai 2. Lintang Jaya 3. Srikandi 4. Sri Kaya
		Pembuatan batako	1. Fajar 2. Bina Harapan
		Nelayan	Nelayan Sejahtera
		Rumah makan	Rumah Makan Maklong
		Pembuatan tempe	1. Tempe Sejahtera 2. Karya Jamur
		Pertukangan kayu	1. Bukit Furniture 2. Sejahtera Abadi
		Jahit pakaian	Melati
2	Sijuk	Pembuatan batako	1. Usaha Mandiri 2. Primadona
		Bengkel motor	Usaha Karya Bersama
		Pembuatan kerupuk	Buegenvil
		Pembuatan kue	1. Daliaana 2. Aster

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

		3. Mawar
	Kerajinan kerang	BEC
	Nelayan	Siantu
	Pertanian	1. Mekar / Kelompok Tani Mekar 2. Suka Karya 3. Sejahtera 4. Binaraga 5. Karya Tani
	Pertukangan	UPK mandiri
	Servis elektronik	Armada
	perbengkelan	Tornado

Kelompok diatas adalah Kelompok-kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) yang berhasil mengembangkan usahanya, beranggotakan 10 orang per kelompok, yang sebagian adalah berasal dari KUBE FM tahun 2006 dan sebagiannya lagi berasal dari KUBE tahun 2008. Ada kurang lebih setengahnya dari jumlah keseluruhan KUBE FM tahun 2006 dan 2008 yang tidak mendapatkan BLPS karena tidak berhasil masuk kualifikasi persyaratan pemberian BLPS karena usahanya tidak mengalami perkembangan atau mengalami penurunan.

Dalam pemberian bantuan ini juga diperlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5-6 bulan sejak pendataan sampai bantuan sampai ke kelompok KUBE, yang masing-masing kelompok mendapat Rp. 30.000.000,00 yang nantinya dana tersebut akan di tranformasi menjadi bentuk barang-barang yang diperlukan, sesuai dengan yang telah dibuatkan di proposal dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat Rp. 50.000.000,00 sebagai dana

pendampingan operasional.⁴⁹ Setelah itu, dilakukan pendampingan terhadap KUBE fakir miskin yang menerima BLPS.

B.3. Implementasi Sub Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial berdasarkan faktor disposisi / sikap pelaksana.

Pengetahuan dan kemampuan dari aparat pelaksana dirasa kurang cukup sehingga khusus pada program ini para pendamping diberi pelatihan khusus oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial, yang pelatihannya dilaksanakan di Bandung. Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga menyatakan: "kemungkinan – kemungkinan terhadap penyelewengan dana itu akan selalu ada, tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada pendamping untuk melakukan pengawasan melalui pembukuan administrasi kelompok dan bukti-bukti kwitansi".⁵⁰

Dalam hal ini Dinas Sosial sedikit lepas tangan, hanya bergerak secara pasif, yang hanya menerima laporan-laporan dari pendamping saja tanpa terjun langsung ke lapangan. Seharusnya mereka terjun aktif mengawasi aliran dana BLPS dengan melakukan pantauan langsung, karena pendamping kelompok dari tingkat desa melaporkan ke desa, dan desa melapor ke pendamping tingkat Kecamatan, baru dari Kecamatan melapor ke pendamping tingkat Kabupaten. Jadi rentang koordinasinya cukup panjang sehingga pengawasan sulit dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten. Dan tentunya juga, kinerja

⁴⁹ . Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No: /PS.5/KPTS/VIII/2009 Tentang Penetapan KUBE dan Pendamping di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Belitung, Penerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), Agustus 2009

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

pendamping juga harus diawasi / masuk dalam pengawasan Dinas Sosial Kabupaten, karena biasanya struktur birokrasi yang lebih rendah jika tidak diawasi oleh tingkat birokrasi yang lebih atas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak akan terlaksana maksimal. Karena jika dilihat dari struktur birokrasi jelas bahwa disini Dinas Sosial Kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab pelaksana program.

B.4. Implementasi Sub Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial berdasarkan faktor struktur birokrasi.

Binaan terhadap BLPS dilakukan selama dua tahun. Tahun pertama adalah binaan kementerian yang dalam hal ini adalah Direktorat Pemberdayaan Sosial dan tahun kedua diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. Adapun pendamping untuk Program BLPS tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel. 8

Daftar Pendamping Untuk Program BLPS tahun 2009

No	Nama	Status Pendamping	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Rosidah	Kabupaten	Tanjungpandan	Tanjungpendam
2	Amsiah	Kecamatan	Tanjungpandan	Lesung Batang
3	Marsidi	Kecamatan	Sijuk	Sijuk
4	Jumhadi	Desa	Sijuk	Keciput
5	Erna Yulinati	Desa	Sijuk	Sijuk
6	Erliana	Desa	Sijuk	Tanjungbinga
7	Rosnadi	Desa	Sijuk	Terong
8	Herlina	Desa	Desa	Air Selumar
9	Tanti Rosita	Desa	Tanjungpandan	Perawas
10	Aryadi	Desa	Tanjungpandan	Air Saga
11	Mukhsin	Desa	Tanjungpandan	Kelurahan Kota
12	Saila Pri Hastuti	Desa	Tanjungpandan	Dukong
13	Iryani	Desa	Tanjungpandan	Air Merbau

C. Pemberdayaan Keluarga tahun 2010

C.1. Implementasi Sub Program Pemberdayaan keluarga berdasarkan faktor komunikasi.

Program Pemberdayaan Keluarga merupakan wadah usaha perorangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan Usaha ini diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih dalam usia produktif, bukan pegawai negeri sipil, menikah diatas 5 tahun, dan umur maksimal 55 tahun. Bantuan ini diberikan untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencaharian sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bantuan ini berupa dana hibah, tidak untuk di kembalikan. Meskipun ini merupakan dana hibah, Dinas Sosial masih tetap melakukan pantauan beberapa bulan sekali.

Identifikasi para penerima bantuan yang dilakukan oleh PSM (pekerja sosial masyarakat) tingkat desa mendapat dukungan dari masyarakat, terlihat dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak selama pendataan, yang pendataan tersebut dilakukan pada bulan february 2010. Koordinasi antar pelaksana khususnya antara PSM, TKSK, dan Dinas Sosial berjalan baik. PSM mendata melalui sensus langsung ke lapangan yang kemudian data tersebut di berikan ke TKSK, dan pada april 2010, TKSK bersama tim survey dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi dan Dinas Sosial

Kabupaten melakukan verifikasi.⁵¹ Komunikasi antar pihak pelaksana berjalan lancar, tidak ditemukan konflik atau perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan Program.

C.2. Implementasi Sub Program Pemberdayaan keluarga berdasarkan faktor sumber daya.

Adapun para penerima bantuan Program Pemberdayaan Keluarga tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel. 9

Daftar Usulan Nama-Nama Penerima Bantuan Pemberdayaan Keluarga

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Nama Penerima	ket
1	Membalong	Ternak	Sumardiana,	1 org
		Nelayan	Amat, Syafarudin,	2 org
		Makanan	Inda Sriwahyuni,	1 org
		Pembuat tikar	Ana,	1 org
		Pembuatan ambong	Jemahar,	1 org
		Pembuat gula aren	Umar, Suryadi,	2 org
		Bengkel	Kardi, Hamidi, Supardi,	3 org
		Pembuat kue	Murni, Miharni,	2 org
		Nelayan	Masani,	1 org
		Pembuat atap daun	Dualim	1 org
2	Badau	Cetak batako	Sumanti, Indra Sofwan, Suryanto, Reman, Armin	5 org
		Petani	Asari, Jumhari, Haryono, Erwandi,	4 org
		Warung makan	Nilawati, Hermala Dewi, Jumiati, Mukanta, Nurmala, Salmah, Nurjanah,	7 org
		Pembuat kue	Yuniarti,	1 org
		Kelontong	Rebuna, Herlina, Raiman, Desifta, Salmah, Anna Indriyani,	6 org
		Pertukangan	Suherman,	1 org

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

		Bengkel	Solihin, Supardi,	2 org
		Kerupuk	Darmiati,	1 org
3	Tanjungpandan	Kelontong	Rina, Dita Pranesti, Anita, Baina, Zainal, Umi Fitria, Heriyansyah, Rifa Siyana, Daqniyati, Rostika Ayu, Aryadi, Jaharin, Dasril, Ipa Astriana, Hamzah Awang, Hendra Winardi, Sutan Sudiar,	17 org
		Pembuat kue	Nurhayati, Anema, Rosaida, Salma, Zainab, Samsidar, Maryana, Usruk, Rikuyawati, Ida Afriyanti, Wiwit Setiarini, Wagini, Julaiha, Jumiat Tola, Nori Poni, Haryati, Yusnawati, Numiati, Nurhasanah, Ida Rumiya, Vika, Efi Rostini, Hadijah, Marhati, Arsiyati, Hamisa, Toatun, Artiati, Nelly Puspita, Rohana, Husia, Muhaini, Hasna,	33 org
		Salon	Niar, Ida,	2 org
		Bengkel	Ropindi, Jaya Suhardono, Marta Mala Dela,	3 org
		Warung makan	Eka Perdata, Soliyah R, Yulianti, Yuyun, Rita Lasuwari, Sumiati,	6 org
		Jualan sayur	Fitriani, Nopianti, Jaidar, Rinawati,	4 org
		Pembuat nasi uduk	Marlena,	1 org
		Jual makanan ringan	Yasri, Ansori Q. Imdam,	2 org
		Batako	Samsuri, Rustam	2 org
		Pertukangan	Buhari,	1 org
		Jual kue	Misni Erawati,	1 org
		Menjahit	Salbiah,	1 org
Total :				115 org

Program Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Belitung memang dirasakan sangat membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin untuk dapat menjalani hidup normal dan dapat

membuatnya mandiri. Dari program ini juga para penyandang masalah kesejahteraan sosial mendapatkan hasil berupa materi untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bantuan yang diberikan dalam program pemberdayaan keluarga ini adalah hibah atau pemberian cuma-cuma, tidak untuk dikembalikan. Waktu yang tersedia cukup untuk dapat mengalokasikan dana. Tidak ada aturan baku mengenai tenggat waktu dana tersebut harus dikucurkan, tetapi dari segi tersedianya sumberdaya, bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Belitung tidak mencapai target dan tidak berhasil secara targetnya karena masih banyak kepala keluarga yang belum menerima bantuan. Hal ini juga disebabkan karena faktor biaya yang sangat minim untuk merealisasikan semua jenis bantuan kepada semua kelompok.

Adapun jumlah sasaran dan realisasi jenis bantuan Program Pemberdayaan Keluarga tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 10.

Jumlah Sasaran dan Realisasi Jenis Bantuan

Jenis program	Jumlah sasaran	Realisasi	Jenis bantuan
Pemberdayaan Keluarga	115 kepala keluarga	60 kepala keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Ternak - Nelayan - Pembuat Tikar - Pembuat Ambong - Pembuat Gula Aren - Bengkel - Pembuat Kue - Pembuat Atap Daun - Cetak Batako - Petani - Warung Makan - Pertukangan

			<ul style="list-style-type: none"> - Kelontong - Kerupuk - Salon - Bengkel Las - Pembuat Nasi Uduk - Penjual Sayur - Pertukangan - Menjahit
--	--	--	---

C.3. Implementasi Sub Program Pemberdayaan keluarga berdasarkan faktor disposisi / sikap pelaksana.

Pada awal tahapan pendataan yang dilakukan oleh PSM (pekerja Sosial Masyarakat) tingkat desa untuk mendata siapa saja dari anggota masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan ini sekaligus lolos dalam kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ini, adapun kriterianya adalah:

- Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang.
- Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan.
- Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
- Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / hujan.
- Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.

- Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
- Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
- Hanya sanggup makan satu / dua kali dalam sehari.
- Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
- Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
- Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁵²

Pihak yang men-survey kelapangan mengalami sedikit kebingungan mengenai kesesuaian aturan kebijakan khususnya masalah pendataan meskipun sebenarnya bukan termasuk masalah yang besar. Misalnya saja menurut Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rumah tangga yang penerangannya tidak menggunakan listrik termasuk kategori fakir miskin. Padahal sebagian besar dari penduduk pedalaman tidak menggunakan listrik karena memang listrik belum masuk khususnya di kawasan kecamatan Membalong dan sekitarnya. Jadi tidaklah mungkin untuk memasukkan seluruh

⁵² Sumber: Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

penduduk di kecamatan Membalong menjadi calon penerima bantuan dalam program ini jika harus berdasarkan kriteria tersebut.

Dalam implementasi program ini, pengetahuan dan kemampuan dari aparat pelaksana tidaklah terlalu diperhitungkan, berbeda dengan program KUBE FM dan BLPS yang dalam programnya memerlukan pendampingan sehingga pengetahuan dan kemampuan aparat selaku pendamping sangat diperlukan. Tetapi walaupun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab dari Dinas Sosial, dalam beberapa bulan sekali Dinas Sosial tetap melakukan pemantauan kepada para penerima bantuan Pemberdayaan Keluarga sehingga diharapkan program ini dapat membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial secara efektif.⁵³

C.4. Implementasi Sub Program Pemberdayaan keluarga berdasarkan faktor struktur birokrasi.

Program ini dibawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Babel sebagai penanggung jawab, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi Kabupaten Belitung. Yang dalam hal ini, diserah tugaskan kepada Seksi Jaminan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga Dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi Kabupaten Belitung, dan dibantu oleh 5 TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) dan 42 PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) tingkat desa.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Sri Wulaning Yuni, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Peran Keluarga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

D. Kesimpulan

Adapun dibawah ini adalah tabel ringkasan analisis dari Program Penanggulangan PMKS khususnya sub Program KUBE FM, BLPS, dan Pemberdayaan Keluarga yang telah berjalan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi program :

Tabel 11.

Analisis implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin
berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan

Pelaksanaan Program	Faktor Komunikasi	Faktor Sumberdaya	Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana	Faktor Struktur Birokrasi
Kelompok usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat masalah terhadap kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana. - Koordinasi antar pihak Desa, Kecamatan, dan Dinas Sosial berjalan baik, walaupun kadang-kadang dari pihak desa sesekali datang ke Dinas Sosial untuk menanyakan kejelasan perihal KUBE FM - Tidak terlihat adanya konflik serius atau perbedaan dalam pelaksanaan program ini, khususnya antara pihak pihak pelaksana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya atau dana yang disediakan untuk KUBE FM berasal dari Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Babel - Dalam mengalokasikan dana, waktu yang diperlukan cukup tersedia walaupun agak terkesan lambat yaitu 5-6 bulan. - Karena alasan efisiensi, bantuan yang diberikan kepada para fakir miskin kebanyakan tidak sesuai dengan yang dimintakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan kemampuan dari aparat agak dipertanyakan. - Tidak terdapat Kesesuaian aturan kebijakan dengan pelaksanaan. Para pendamping banyak yang melepas begitu saja para penerima KUBE, padahal fungsi pendamping adalah memberikan bimbingan dalam mengelola usaha, membina bagaimana agar meningkatkan penghasilan dan mengajarkan aturan pembukuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat masalah dalam kejelasan struktur birokrasi pemerintah; sebagai penanggung jawab pelaksana program. - Pemerintah tidak bergerak efektif dan hanya bersifat pasif

Tabel 12.

Analisis implementasi Program BLPS berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan

Pelaksanaan Program	Faktor Komunikasi	Faktor Sumberdaya	Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana	Faktor Struktur Birokrasi
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan masalah yang signifikan dalam kejelasan memberikan perintah dari Dinas kepada aparat pelaksana - Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Program BLPS, semuanya berjalan baik. - Terdapat sedikit hambatan seperti sebagian anggota KUBE FM tidak tahu caranya bagaimana membuat proposal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya atau dana yang disediakan untuk BLPS berasal dari Direktorat Pemberdayaan Sosial - Dalam mengalokasikan dana, waktu yang diperlukan cukup yaitu 5-6 bulan setelah pendataan - Realisasi bantuan mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan kemampuan dari aparat ditingkatkan melalui pelatihan. - Kesesuaian aturan kebijakan dengan pelaksanaan agak kurang maksimal. proses pendampingan hanya dilakukan seperlunya saja 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat masalah dalam kejelasan struktur birokrasi pemerintah sebagai penanggung jawab, dimana tahun pertama adalah binaan Direktorat Pemberdayaan Sosial dan tahun kedua Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung - Dilihat dari struktur birokrasi, Dinas Sosial Kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab tetapi Dinas Sosial agak sedikit lepas tangan, hanya bergerak secara pasif, yang hanya menerima laporan-laporan dari pendamping saja tanpa terjun langsung ke lapangan

Tabel 13.

Analisis implementasi Program Pemberdayaan Keluarga
berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan

Pelaksanaan Program	Faktor Komunikasi	Faktor Sumberdaya	Faktor Disposisi / Sikap Pelaksana	Faktor Struktur Birokrasi
Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar pelaksana khususnya antara PSM, TKSK, dan Dinas Sosial berjalan baik - Adanya kerjasama yang baik antara PSM dan masyarakat selama pendataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya atau dana yang disediakan untuk program Pemberdayaan Keluarga berasal dari Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bangka Belitung. - Dalam mengalokasikan dana, waktu yang diperlukan cukup - Biaya yang minim/ kurang sehingga realisasi bantuan tidak mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dan kemampuan dari aparat dalam pelaksanaan program ini tidak terlalu dipersoalkan atau tidak diperlukan skill khusus. - Kesesuaian aturan kebijakan dengan pelaksanaan agak sedikit dipertanyakan, dimana terdapat sedikit konflik prosedur dalam pendataan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat masalah dalam kejelasan struktur birokrasi Pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksana - Pelaksanaan kebijakan Program berjalan efektif

Dari tabel ringkasan analisis dari Program Penanggulangan PMKS khususnya sub Program KUBE FM, BLPS, dan Pemberdayaan Keluarga maka dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dari program Penanggulangan PMKS adalah :

1. Di tahun 2006-2007, Kabupaten Belitung mengalami peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 1,54 % dibanding tahun-tahun sebelumnya, berbeda dengan kabupaten lain yang secara garis besar mengalami penurunan. Dilihat dari analisis implementasi program KUBE FM dapat dilihat bahwa sikap dan tindakan Pemkab dalam menangani Fakir miskin hanya bersifat seremonial dan sporadis saja. Terbukti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung hanya memiliki data kearsipan dari tahun 2008 saja, itupun hanya sebagian, disebabkan karena masalah internal pengarsipan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung sejak sebelum tahun 2006 sampai 2008. Terlihat implementasi program tersebut hanya sekadar untuk menyenangkan hati masyarakat dan menghabiskan anggaran, bukan secara aktif benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, sehingga jumlah PMKS tidak menurun, bahkan malah bertambah sebanyak 1,54% pada tahun 2006-2007.
2. Daya saing yang begitu tinggi terhadap usaha swasta mandiri lainnya sehingga membuat para KUBE bosan dan menyerah terhadap persaingan tersebut dan tidak mendapat hasil yang diinginkan. Untuk menanggulangi hal inilah maka perlunya diadakan pendampingan, tetapi dalam

kenyataannya proses pendampingan hanya dilakukan seperlunya saja atau dengan kata lain belum bisa dikatakan berhasil atau maksimal.

3. Lemahnya pengawasan pemerintah sehingga proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping untuk program BLPS juga kurang maksimal, sama seperti program KUBE FM. Dimana pendamping juga berkewajiban untuk memberikan support ilmu maupun dorongan mental kepada para fakir miskin dalam mengembangkan usaha, dimana kebanyakan mereka tidaklah memiliki pendidikan yang tinggi sehingga perlu untuk di bimbing.
4. Pada program Pemberdayaan Keluarga Sumber daya minim sehingga realisasi bantuan tidak mencapai target.
5. Tidak terdapat dukungan dari iklim usaha pada program Pemberdayaan Keluarga dikarenakan produk barang yang dipasarkan tidak sesuai dengan kondisi pasar yang kian modern contohnya pada usaha pembuat tikar tradisional, pembuat atap dan pembuat ambong sehingga diperlukan keahlian lain yang mendukung iklim usaha agar bisa mengikuti selera pasar yang semakin modern.
6. Keahlian dan pengalaman para penerima bantuan Pemberdayaan Keluarga ini juga sangat minim akibatnya pengembangan usaha tidak mengalami kemajuan secara signifikan, sehingga bantuan ini dirasakan hanya bersifat temporary saja atau sementara saja, yang hanya membantu para PMKS untuk bertahan sebentar saja dalam mengatasi kesulitan hidupnya.

Adapun faktor pendukung dari program Penanggulangan PMKS ini yaitu :

1. Dalam program KUBE FM terdapat adanya antusias yang besar di kalangan para calon penerima bantuan sehingga koordinasi dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Belitung ke calon penerima bantuan tidak terkendala
2. Dalam program BLPS, Salah satu faktor pendukung keberhasilan program ini adalah para anggota kelompok penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ini sudah memiliki pengalaman usaha sebelumnya dalam mengembangkan usaha yaitu pada program KUBE FM, jadi mereka tidak perlu merintis usaha dari awal lagi melainkan hanya melanjutkan usahanya saja agar menjadi lebih besar dan berkembang.
3. Pada keseluruhan program baik itu sub Program KUBE FM, BLPS dan Pemberdayaan Keluarga terdapat adanya dukungan yang baik dari masyarakat sehingga pendataan yang dilakukan oleh PSM (pekerja sosial masyarakat) yang semuanya berjumlah 42 PSM dan TKSK (tenaga kerja sosial kecamatan) yang semuanya berjumlah 5 TKSK berjalan dengan baik. juga terdapat peran serta masyarakat yang membantu mewujudkan program-program yang telah direncanakan.

Merujuk pada faktor penghambat dan pendukung diatas, disertai dengan faktor-faktor lainnya baik itu dari segi komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa Program Penanggulangan PMKS melalui sub program KUBE FM, BLPS, dan

Pemberdayaan Keluarga dinyatakan kurang berhasil. Dimana masih terdapat masalah khususnya pada faktor disposisi/ sikap pelaksana dan faktor sumber daya. Banyak terdapat tidak adanya kesesuaian antara aturan kebijakan dengan aturan pelaksana dan juga minimnya sumberdaya, sehingga bantuan tidak mencakup atau menjangkau keseluruhan komunitas PMKS.